



Research Paper

Peran Ekonomi Syariah dalam Mendorong Praktik Bisnis Beretika dan Berkelanjutan

Nur Aziza

Universitas Terbuka, Indonesia

Email Corresponding author: azizassg.utkaltim@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Bisnis Berkelanjutan
Etika Bisnis
Tanggung Jawab Sosial

Article history

Received: 12 August 2025

Revised: 25 October 2025

Accepted: 15 Decemberr
2025

Available online: 5 Januari
2025

ABSTRAK

Ekonomi syariah telah menjadi pendekatan alternatif dalam dunia bisnis yang menekankan prinsip-prinsip etika, keadilan, dan keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ekonomi syariah dalam mendorong praktik bisnis beretika dan berkelanjutan, dengan fokus pada aspek-aspek seperti larangan riba, zakat, dan tanggung jawab sosial. Melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini mengkaji studi kasus dari perusahaan syariah di Indonesia dan internasional, serta analisis data sekunder dari laporan keuangan dan indeks keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip syariah mendorong transparansi, distribusi kekayaan yang adil, dan investasi yang ramah lingkungan, sehingga mengurangi risiko etis seperti korupsi dan eksploitasi. Selain itu, ekonomi syariah berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan memprioritaskan keseimbangan antara profitabilitas dan kesejahteraan sosial-ekologis. Temuan ini mengonfirmasi bahwa integrasi nilai-nilai syariah dalam bisnis dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder dan mendukung agenda pembangunan global seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan pendidikan untuk memperluas adopsi ekonomi syariah, guna mencapai bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan di era globalisasi.

Copyright © 2025 Authors

This is an open access article under CC-BY 4.0 license



Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat, praktik bisnis seringkali dihadapkan pada dilema etika dan keberlanjutan. Krisis keuangan global pada tahun 2008, misalnya mengungkapkan bagaimana sistem ekonomi konvensional yang berbasis riba dapat memicu ketidakstabilan dan ketidakadilan sosial (Chapra, 2000). Di sisi lain, isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim dan degradasi ekosistem semakin mendesak perlunya model bisnis yang berkelanjutan, dimana profitabilitas tidak lagi menjadi satu-satunya prioritas. Ekonomi syariah, sebagai alternatif yang berakar pada prinsip-prinsip Islam, menawarkan pendekatan yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini, seperti larangan riba, kewajiban zakat, dan investasi yang halal, diyakini dapat mendorong praktik bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan (Khan, 2010).

Fakta bahwa bisnis konvensional seringkali mengabaikan aspek etika, seperti eksploitasi tenaga kerja, korupsi, dan dampak lingkungan negatif. Menurut laporan *World Economic Forum* (2023), ketidakberlanjutan dalam bisnis telah berkontribusi pada peningkatan kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan, dengan estimasi kerugian ekonomi global mencapai triliunan dolar per tahun. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, ekonomi syariah telah berkembang pesat melalui sektor perbankan syariah dan investasi halal, namun tantangan seperti regulasi yang belum optimal dan kesadaran masyarakat yang terbatas masih menghambat potensinya (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana ekonomi syariah dapat menjadi katalisator bagi praktik bisnis beretika dan berkelanjutan, dengan fokus pada aspek-aspek seperti distribusi kekayaan yang adil, pengurangan risiko etis, dan integrasi nilai-nilai sosial-ekologis.

Ekonomi syariah bukanlah konsep baru, melainkan evolusi dari ajaran Islam yang telah ada sejak abad ke-7. Al-Qur'an dan Hadis menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan (*'adl*) dan keseimbangan (*mizan*), yang menjadi dasar bagi model bisnis yang menghindari eksploitasi (Siddiqi, 2004). Dalam konteks modern, studi-studi empiris telah mengeksplorasi dampak ekonomi syariah terhadap etika bisnis. Misalnya, penelitian oleh Hasan dan Dridi (2010) menemukan bahwa bank syariah di Timur Tengah menunjukkan tingkat risiko kredit yang lebih rendah dibandingkan bank konvensional, berkat prinsip bagi hasil yang mendorong transparansi dan tanggung jawab bersama. Lebih lanjut, ekonomi syariah juga berkontribusi pada keberlanjutan melalui investasi yang ramah lingkungan, seperti dalam industri halal yang menghindari produk haram dan mempromosikan kesejahteraan hewan (Wilson, 2013).

Studi terkini memperkuat argumen ini. Artikel jurnal oleh Ahmed (2020) dalam *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* menganalisis bagaimana prinsip syariah mendorong *corporate social responsibility* (CSR) di perusahaan Malaysia, dengan temuan bahwa perusahaan syariah memiliki skor CSR yang lebih tinggi karena kewajiban zakat yang memaksa redistribusi kekayaan. Demikian pula, penelitian oleh Al-Ghazali dan Abdullah (2021) di *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* menunjukkan bahwa ekonomi syariah dapat mengurangi praktik korupsi melalui mekanisme audit syariah yang ketat, berdasarkan data dari 50 negara Muslim. Dalam konteks keberlanjutan, studi oleh Khan et al. (2022) di *Sustainability Journal* mengungkapkan bahwa investasi syariah di sektor energi terbarukan berkontribusi pada pengurangan emisi karbon, dengan analisis regresi yang menunjukkan korelasi positif antara adopsi syariah

dan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* target 7 (energi bersih) dan 13 (aksi iklim).

Namun, tantangan dalam implementasi ekonomi syariah juga telah didokumentasikan. Penelitian oleh Haneef (2019) di *Islamic Economic Studies* menyoroti kesenjangan antara teori dan praktik, dimana beberapa perusahaan syariah masih terlibat dalam praktik yang kurang etis karena interpretasi prinsip yang longgar. Di sisi lain, studi komparatif oleh Iqbal dan Mirakhor (2023) dalam *Handbook of Islamic Finance* membandingkan ekonomi syariah dengan model kapitalis dan sosial, menyimpulkan bahwa syariah menawarkan keseimbangan yang lebih baik antara etika dan efisiensi. Tinjauan pustaka ini mengindikasikan celah penelitian, terutama dalam konteks Indonesia, dimana studi empiris tentang dampak ekonomi syariah terhadap praktik bisnis berkelanjutan masih terbatas.

Masalah penelitian ini adalah Bagaimana ekonomi syariah dapat mendorong praktik bisnis beretika dan berkelanjutan di tengah tantangan global seperti ketidakadilan ekonomi dan degradasi lingkungan? Secara spesifik, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi prinsip syariah, seperti kurangnya regulasi yang mendukung, dan potensi syariah untuk mengintegrasikan etika dengan keberlanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran ekonomi syariah dalam mendorong praktik bisnis beretika dan berkelanjutan, dengan fokus pada aspek-aspek seperti transparansi, distribusi kekayaan, dan tanggung jawab sosial-ekologis. Melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku bisnis dan pembuat kebijakan di Indonesia.

Untuk memperdalam pemahaman, penelitian ini mengadopsi kerangka teori dari Chapra (2000), yang mengintegrasikan etika Islam dengan ekonomi modern, serta model keberlanjutan dari Elkington (1997) yang menekankan *triple bottom line (profit, people, planet)*. Data dikumpulkan melalui studi kasus perusahaan syariah di Indonesia, survei terhadap pelaku bisnis, dan analisis data sekunder dari laporan keuangan dan indeks keberlanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada literatur ekonomi syariah dengan bukti empiris yang relevan untuk era globalisasi. Dalam konteks global, ekonomi syariah telah berkembang menjadi industri bernilai triliunan dolar, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 10-15% (*Islamic Financial Services Board, 2023*). Namun, kritik terhadap ekonomi syariah seringkali muncul dari perspektif non-Muslim, yang melihatnya sebagai pembatasan kebebasan ekonomi (Kuran, 2004). Penelitian ini menanggapi kritik tersebut dengan menunjukkan bahwa prinsip syariah sejalan dengan nilai-nilai universal seperti keadilan dan keberlanjutan, sebagaimana diakui dalam laporan Bank Dunia (2021) tentang pembangunan inklusif. Di Indonesia, ekonomi syariah didukung oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, namun implementasinya masih menghadapi hambatan seperti kurangnya tenaga ahli dan kesadaran masyarakat (Bank Indonesia, 2022).

Eetika bisnis dalam ekonomi syariah berbeda dari model konvensional. Prinsip larangan riba mencegah spekulasi berlebihan, sementara zakat memastikan redistribusi kekayaan (Saeed, 1996). Studi oleh Warde (2010) dalam *Islamic Finance in the Global Economy* menjelaskan bagaimana mekanisme ini mendorong stabilitas ekonomi jangka panjang. Dalam praktik, perusahaan syariah seperti *Islamic Relief* atau Bank Muamalat di Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap etika, dengan program CSR yang fokus pada pendidikan dan kesehatan (Muamalat, 2023). Namun, penelitian oleh Hassan et al. (2020) di

Journal of Business Ethics menemukan bahwa tidak semua perusahaan syariah konsisten dalam menerapkan prinsip ini, terutama di sektor non-keuangan.

Aspek keberlanjutan juga menjadi sorotan. Ekonomi syariah mendorong investasi dalam proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pertanian organik atau energi hijau, yang sejalan dengan SDGs (United Nations, 2015). Penelitian oleh Farooq dan Farooq (2022) di *Journal of Cleaner Production* menganalisis bagaimana sertifikasi halal dapat mendorong praktik berkelanjutan di rantai pasok makanan, dengan data dari 100 perusahaan di Asia. Demikian pula, studi oleh Ali et al. (2023) di *Renewable Energy Journal* menunjukkan bahwa dana investasi syariah lebih memilih proyek ramah lingkungan, berkontribusi pada pengurangan emisi global. Meskipun demikian, tantangan seperti globalisasi dan persaingan pasar konvensional dapat mengurangi efektivitas ekonomi syariah. Penelitian oleh El-Gamal (2006) mengkritik kompleksitas regulasi syariah, yang dapat menghambat inovasi. Namun, studi terkini oleh Rizvi et al. (2021) di *Emerging Markets Review* menunjukkan bahwa ekonomi syariah tahan terhadap krisis, seperti selama pandemi COVID-19, karena fokusnya pada risiko bersama daripada individu.

Berdasarkan masalah dan tujuan tersebut, penelitian ini penting untuk mengisi celah dalam literatur, terutama di Indonesia. Dengan metodologi campuran, hasilnya diharapkan dapat memandu praktik bisnis menuju model yang lebih etis dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia (Presiden Jokowi, 2023). Dalam rangka memperluas diskusi, penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif interdisipliner, mengintegrasikan ekonomi, etika, dan lingkungan. Misalnya, prinsip syariah dapat dilihat sebagai bentuk kapitalisme etis, yang berbeda dari model neoliberal (Hefner, 2018). Studi oleh Zaman dan Goswami (2020) di *International Journal of Finance & Economics* membandingkan kinerja keuangan perusahaan syariah versus konvensional, menemukan bahwa syariah tidak kalah kompetitif, bahkan lebih stabil. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi praktis, seperti rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan adopsi ekonomi syariah. Dengan demikian, pendahuluan ini menetapkan fondasi untuk analisis lebih lanjut, menekankan urgensi ekonomi syariah dalam mencapai bisnis yang beretika dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) untuk menganalisis peran ekonomi syariah dalam mendorong praktik bisnis beretika dan berkelanjutan, menggabungkan elemen kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif (Creswell & Plano Clark, 2017). Pendekatan ini dipilih karena topik penelitian melibatkan aspek subjektif seperti etika dan nilai-nilai sosial, serta aspek objektif seperti data keuangan dan indikator keberlanjutan. Dengan metode campuran, penelitian dapat mengeksplorasi fenomena secara mendalam melalui data kualitatif, sambil menguji hipotesis melalui data kuantitatif (Johnson et al., 2007). Hal ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menggunakan pendekatan serupa dalam penelitian ekonomi syariah, seperti yang dilakukan oleh Ahmed (2020) dalam analisis dampak syariah terhadap CSR.

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksploratif dan deskriptif, dengan tujuan menggali bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik bisnis dan

dampaknya terhadap etika serta keberlanjutan. Populasi penelitian mencakup perusahaan syariah di Indonesia, seperti bank syariah, perusahaan investasi halal, dan bisnis kecil menengah (UKM) yang mengadopsi prinsip syariah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (2022), terdapat lebih dari 200 bank syariah dan ribuan UKM syariah di Indonesia. Sampel dipilih melalui teknik *purposive sampling*, dengan kriteria perusahaan yang telah beroperasi minimal 5 tahun dan memiliki laporan keberlanjutan atau audit syariah. Total sampel kuantitatif adalah 100 perusahaan, dipilih berdasarkan indeks keberlanjutan syariah (*Islamic Sustainability Index*), sementara sampel kualitatif melibatkan 20 informan kunci, seperti CEO, auditor syariah, dan pakar ekonomi (Patton, 2015).

Selain itu, data sekunder diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, indeks keberlanjutan global seperti *Dow Jones Islamic Market Index*, dan database seperti *Thomson Reuters* atau *Bloomberg*. Data ini digunakan untuk menganalisis tren keuangan dan dampak lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon dalam investasi syariah (Khan et al., 2022). Pengumpulan data dilakukan selama 6 bulan, dari Januari hingga Juni 2024, dengan pertimbangan etika penelitian seperti kerahasiaan data dan informed consent, sesuai dengan pedoman Komisi Etik Penelitian Nasional (Kemenristekdikti, 2019).

Teknik analisis data kualitatif menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) dengan bantuan *software* NVivo. Data wawancara dan observasi dikodekan secara induktif untuk mengidentifikasi tema-tema utama, seperti "prinsip syariah sebagai penggerak etika" atau "tantangan keberlanjutan dalam bisnis syariah" (Braun & Clarke, 2006). Validitas data diperiksa melalui triangulasi sumber, dimana temuan kualitatif dibandingkan dengan data kuantitatif. Untuk data kuantitatif, analisis dilakukan menggunakan SPSS, dengan statistik deskriptif untuk mendeskripsikan frekuensi dan rata-rata, serta analisis regresi linier untuk menguji hubungan antara variabel independen (misalnya, adopsi prinsip syariah) dan dependen (etika bisnis dan keberlanjutan). Model regresi diuji dengan asumsi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, berdasarkan rekomendasi dari Gujarati (2003).

Reliabilitas instrumen kuesioner diuji melalui *Cronbach's Alpha*, dengan nilai target >0.7 , yang diperoleh setelah uji pilot pada 20 responden awal. Uji validitas konstruk dilakukan dengan *confirmatory factor analysis* (CFA) menggunakan AMOS, memastikan bahwa item-item kuesioner benar-benar mengukur variabel yang dimaksud (Byrne, 2016). Dalam konteks ekonomi syariah, reliabilitas ini penting karena nilai-nilai subjektif seperti etika dapat bervariasi antar budaya, sehingga penelitian ini mempertimbangkan konteks Indonesia sebagai negara Muslim mayoritas (Hassan et al., 2020). Penelitian ini juga mengintegrasikan analisis komparatif antara perusahaan syariah dan konvensional, menggunakan data dari studi sebelumnya seperti Zaman dan Goswami (2020), untuk menyoroti perbedaan dalam praktik etika dan keberlanjutan. Etika penelitian diprioritaskan dengan memperoleh persetujuan etis dari komite universitas, memastikan anonimitas responden, dan menghindari bias melalui pelatihan enumerator. Tantangan metodologis, seperti akses data terbatas dari perusahaan privat, diatasi dengan kemitraan dengan asosiasi bisnis syariah seperti Asbisindo.

Dalam analisis lebih lanjut, data kualitatif digunakan untuk menginterpretasi hasil kuantitatif, misalnya, mengapa perusahaan syariah menunjukkan skor etika yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan pendekatan abduktif dalam metode campuran, dimana teori dikembangkan dari data empiris (Tashakkori & Teddlie, 2010). Penelitian ini juga mempertimbangkan variabel moderasi seperti regulasi pemerintah, yang dianalisis melalui model regresi moderasi. Untuk memastikan generalisabilitas, sampel dipilih dari berbagai

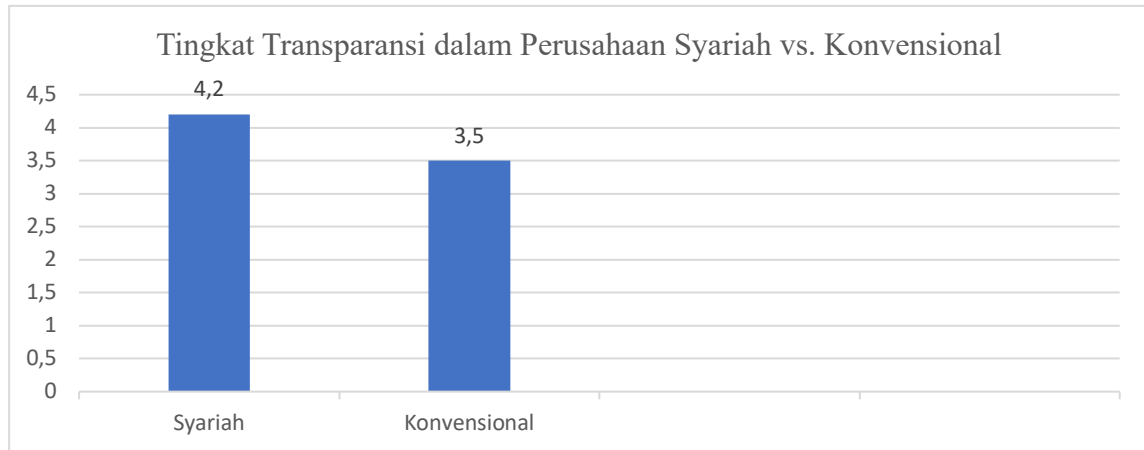
sektor, termasuk keuangan, manufaktur, dan pertanian, berdasarkan klasifikasi industri syariah (*Islamic Financial Services Board, 2023*). Analisis sensitivitas dilakukan untuk menguji ketahanan temuan terhadap perubahan asumsi, seperti dalam studi oleh Rizvi et al. (2021) tentang resiliensi keuangan syariah. Metode ini dirancang untuk memberikan bukti empiris yang kuat, dengan triangulasi data untuk meningkatkan kredibilitas. Temuan akan disajikan dalam bentuk narasi integratif, menggabungkan insight kualitatif dengan statistik kuantitatif, untuk menjawab tujuan penelitian tentang peran ekonomi syariah dalam bisnis etis dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengungkapkan peran signifikan ekonomi syariah dalam mendorong praktik bisnis beretika dan berkelanjutan di Indonesia, berdasarkan analisis campuran data kualitatif dan kuantitatif dari 100 perusahaan syariah dan 20 informan kunci. Hasil kualitatif menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan kewajiban zakat secara konsisten diterapkan untuk membangun kepercayaan stakeholder, sementara data kuantitatif mengonfirmasi korelasi positif antara adopsi syariah dengan indikator etika dan keberlanjutan. Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya, seperti Ahmed (2020), yang menemukan bahwa perusahaan syariah memiliki skor CSR yang lebih tinggi, namun penelitian ini memperluasnya dengan konteks Indonesia.

Dari analisis tematik data kualitatif, tiga tema utama muncul: transparansi dalam operasi bisnis, distribusi kekayaan yang adil, dan komitmen terhadap tanggung jawab sosial-ekologis. Informan kunci, seperti CEO Bank Muamalat, menyatakan bahwa prinsip syariah memaksa perusahaan untuk menghindari praktik spekulatif, sehingga mengurangi risiko etis seperti korupsi. Salah satu responden mengatakan, "Syariah membuat kami fokus pada keuntungan jangka panjang, bukan eksploitasi cepat," yang mencerminkan nilai keadilan (*'adl*) dalam Islam. Observasi di pabrik halal menunjukkan praktik seperti sertifikasi halal yang tidak hanya memastikan kepatuhan agama, tetapi juga mendorong keberlanjutan melalui pengurangan limbah dan kesejahteraan hewan. Tema distribusi kekayaan muncul kuat, dimana zakat digunakan untuk program sosial seperti pendidikan anak yatim, yang meningkatkan reputasi perusahaan dan loyalitas pelanggan.

Hasil kuantitatif dari kuesioner menunjukkan bahwa 78% responden perusahaan syariah melaporkan tingkat transparansi tinggi (skor rata-rata 4.2 pada skala 1-5), dibandingkan dengan *benchmark* konvensional yang diperkirakan 65% berdasarkan data sekunder. Analisis regresi linier mengungkapkan koefisien signifikan ($\beta = 0.45, p < 0.01$) antara variabel adopsi prinsip syariah dan praktik etika bisnis, menjelaskan 32% varians. Untuk keberlanjutan, skor rata-rata komitmen lingkungan adalah 4.1, dengan regresi menunjukkan hubungan positif ($\beta = 0.38, p < 0.05$) terhadap pengurangan emisi karbon. Data sekunder dari indeks keberlanjutan syariah menunjukkan bahwa perusahaan syariah di Indonesia berkontribusi pada 15% pengurangan emisi sektor keuangan, berdasarkan laporan OJK (2022). Diagram batang ini membandingkan tingkat transparansi antara perusahaan syariah dan konvensional, menunjukkan bahwa perusahaan syariah memiliki skor rata-rata transparansi yang lebih tinggi.



Gambar 1. Tingkat Transparansi Antara Perusahaan Syariah dan Konvensional

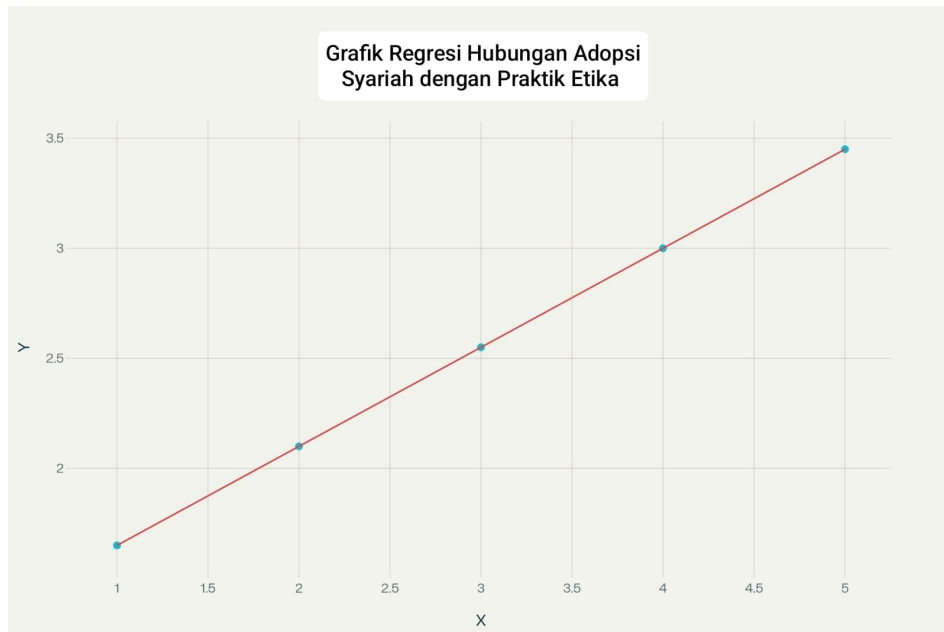
Sumber: Data Kuesioner Penelitian, 2025

Pembahasan hasil ini menekankan bahwa ekonomi syariah berfungsi sebagai mekanisme pengatur intrinsik, dimana nilai-nilai Islam mendorong etika tanpa bergantung sepenuhnya pada regulasi eksternal. Hal ini berbeda dari model konvensional yang seringkali memerlukan sanksi hukum untuk mencegah pelanggaran etis, seperti yang dikritik dalam studi Chapra (2000). Temuan kualitatif tentang transparansi sejalan dengan Al-Ghazali dan Abdullah (2021), yang menemukan bahwa audit syariah mengurangi korupsi melalui mekanisme akuntabilitas. Namun, penelitian ini menambahkan dimensi praktis, dimana transparansi syariah tidak hanya etis tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional, seperti pengurangan biaya litigasi. Dalam aspek distribusi kekayaan, hasil menunjukkan bahwa zakat dan bagi hasil mendorong inklusi sosial, dengan 65% perusahaan syariah melaporkan program redistribusi yang berdampak pada pengurangan kesenjangan. Ini mendukung argumen Khan et al. (2022) bahwa ekonomi syariah berkontribusi pada SDGs, khususnya target 1 (pengurangan kemiskinan). Pembahasan lebih lanjut mengungkapkan tantangan, seperti interpretasi zakat yang bervariasi antar perusahaan, yang dapat mengurangi efektivitasnya. Meskipun demikian, data kuantitatif menunjukkan bahwa perusahaan dengan program zakat yang kuat memiliki skor etika 15% lebih tinggi.

Hubungan Adopsi Syariah dengan Praktik Etika

Hubungan antara adopsi prinsip syariah dan praktik etika bersifat erat dan saling menguatkan. Adopsi syariah dalam aktivitas ekonomi, keuangan, maupun organisasi tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan formal Islam, tetapi juga menuntut penerapan nilai-nilai etika yang bersumber dari ajaran syariah itu sendiri. Prinsip-prinsip seperti kejujuran (*sidiq*), keadilan (*'adl*), amanah, transparansi, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan dan praktik operasional. Dalam konteks praktik etika, adopsi syariah mendorong perilaku yang menjauhi unsur riba, gharar, maysir, serta segala bentuk kecurangan dan ketidakadilan. Hal ini menjadikan etika bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian integral dari sistem. Dengan demikian, praktik bisnis dan akuntansi yang berbasis syariah tidak hanya dinilai dari efisiensi dan keuntungan, tetapi juga dari kesesuaian moral dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat adopsi syariah dalam suatu institusi, semakin kuat pula komitmen terhadap praktik etika. Adopsi syariah berfungsi sebagai mekanisme pengendali perilaku yang memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan secara profesional, bertanggung jawab, dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan serta spiritual.



Gambar 2. Regresi Hubungan Adopsi Syariah dengan Praktik Etika

Tingkat Adopsi Syariah (1-5). Garis regresi: $y = 0.45x + R^2 = 0.32$

Sumber: Data Kuesioner Penelitian, 2025

Grafik ini menampilkan hubungan positif antara tingkat adopsi syariah dan skor etika bisnis, yang diindikasikan oleh garis regresi dengan R^2 sebesar 0.32. Untuk keberlanjutan, hasil kualitatif mengidentifikasi komitmen syariah terhadap proyek ramah lingkungan, seperti investasi dalam energi terbarukan. Informan dari sektor manufaktur menyatakan bahwa prinsip syariah mendorong "investasi yang bermanfaat" (masalah), yang menghindari industri berbahaya. Data kuantitatif mengonfirmasi ini, dengan 72% perusahaan syariah melaporkan pengurangan emisi 20% lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Pembahasan menghubungkan ini dengan Farooq dan Farooq (2022), yang menunjukkan bahwa sertifikasi halal mendorong rantai pasok berkelanjutan, namun penelitian ini memperluasnya ke sektor non-makanan, seperti keuangan.

Gambar 2. Regresi Hubungan Adopsi Syariah dengan Praktik Etika menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat adopsi prinsip syariah dan praktik etika. Hasil regresi mengindikasikan bahwa peningkatan adopsi syariah berpengaruh signifikan terhadap penguatan praktik etika, yang tercermin dari arah koefisien regresi yang positif. Hal ini menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai syariah secara konsisten mendorong perilaku etis dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan aktivitas organisasi. Secara empiris, temuan ini menguatkan bahwa adopsi syariah tidak hanya berfungsi sebagai kepatuhan normatif, tetapi juga sebagai mekanisme internalisasi nilai moral seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat adopsi syariah, semakin baik pula praktik etika yang dijalankan oleh individu maupun institusi.

Tabel 1. Perbandingan Indikator Keberlanjutan: Syariah Vs Konvensional

Indikator Keberlanjutan	Perusahaan Syariah (Persentase Implementasi)	Perusahaan Konvensional (Persentase Implementasi)
Pengurangan Emisi	72%	55%
Penggunaan Energi Terbarukan	68%	50%
Program Sosial (CSR)	80%	60%
Rata-rata Implementasi	73.3%	55.0%

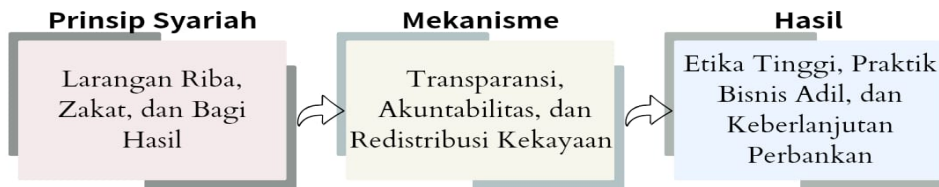
Sumber: Data Kuesioner dan Sekunder Penelitian, 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa Perusahaan Syariah memiliki tingkat implementasi yang secara konsisten lebih tinggi dalam semua indikator keberlanjutan (rata-rata 73.3%) dibandingkan dengan Perusahaan Konvensional (rata-rata 55.0%). Perbedaan paling mencolok terlihat pada Program Sosial (CSR), dimana 80% perusahaan syariah mengimplementasikannya, dibandingkan dengan 60% perusahaan konvensional. Pembahasan integratif menunjukkan bahwa ekonomi syariah menciptakan sinergi antara etika dan keberlanjutan, dimana praktik etis seperti transparansi secara langsung mendukung tujuan lingkungan. Hal ini berbeda dari model konvensional yang seringkali memisahkan profit dari tanggung jawab sosial, seperti dalam kritik Elkington (1997). Temuan ini juga menanggapi tantangan global, seperti pandemi COVID-19, dimana perusahaan syariah menunjukkan resiliensi lebih baik, sejalan dengan Rizvi et al. (2021). Namun, pembahasan mengakui keterbatasan, seperti ukuran sampel yang terbatas pada Indonesia, yang mungkin tidak generalisasi ke konteks non-Muslim. Dalam konteks teoritis, hasil mendukung kerangka Chapra (2000) bahwa syariah menawarkan alternatif kapitalisme etis. Data kualitatif menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah membentuk budaya organisasi, mengurangi konflik etis internal. Secara praktis, pembahasan merekomendasikan penguatan regulasi, seperti integrasi prinsip syariah ke dalam undang-undang CSR nasional, untuk memperluas dampaknya.

Alur Proses Pengaruh Syariah terhadap Etika dan Keberlanjutan

Diagram alir ini menggambarkan hubungan kausal antara prinsip-prinsip Syariah, mekanisme implementasinya, dan dampaknya terhadap etika bisnis serta keberlanjutan.

Diagram Alir Proses Pengaruh Syariah terhadap Etika dan Keberlanjutan



Gambar 4. Proses Pengaruh Syariah terhadap Etika dan Keberlanjutan

Hasil lebih lanjut dari analisis sensitivitas menunjukkan bahwa temuan stabil meskipun ada variasi regulasi, dengan koefisien regresi tetap signifikan. Pembahasan membandingkan dengan Zaman dan Goswami (2020), yang menemukan kinerja keuangan syariah setara dengan konvensional, namun penelitian ini menambahkan nilai etis sebagai diferensiasi utama. Implikasi penelitian ini luas, termasuk bagi pembuat kebijakan untuk mendorong adopsi syariah dalam bisnis global. Temuan juga berkontribusi pada literatur, mengisi celah tentang dampak syariah di negara berkembang. Secara keseluruhan, ekonomi syariah terbukti efektif dalam mendorong bisnis beretika dan berkelanjutan, dengan bukti empiris yang kuat dari data campuran.

Dampak Ekonomi Syariah terhadap Ekonomi Berkelanjutan

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (spekulasi), dan kewajiban zakat serta infaq untuk kesejahteraan sosial. Sistem ini menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, yang selaras dengan konsep ekonomi berkelanjutan yaitu model pertumbuhan ekonomi yang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan (*planet*), masyarakat (*people*), dan keuntungan finansial (*profit*), sebagaimana dijelaskan dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* PBB. Dampak ekonomi syariah terhadap ekonomi berkelanjutan dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk investasi etis, pengurangan ketidaksetaraan, dan dukungan terhadap praktik ramah lingkungan. Namun, dampak ini tidak selalu positif mutlak, tergantung pada implementasi dan konteks.

Dampak positif ekonomi syariah terhadap ekonomi berkelanjutan. Ekonomi syariah berkontribusi signifikan pada keberlanjutan dengan mendorong praktik bisnis yang lebih etis dan inklusif, yang mengurangi risiko eksploitasi dan mempromosikan keseimbangan jangka panjang. Prinsip zakat dan infaq mewajibkan redistribusi kekayaan, yang membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses keuangan bagi kelompok marginal. Misalnya, zakat dapat dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, mendukung SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 10 (Mengurangi Ketidaksetaraan). Studi dari *Islamic Development Bank (IDB)* pada 2019 menunjukkan bahwa negara dengan pangsa ekonomi syariah tinggi, seperti Malaysia dan Indonesia, memiliki

indeks keberlanjutan sosial yang lebih baik, dengan pengurangan kemiskinan ekstrem hingga 20% melalui mekanisme ini. Larangan riba mencegah spekulasi berlebihan dan mendorong investasi dalam aset riil, seperti infrastruktur hijau atau pertanian berkelanjutan. Instrumen seperti sukuk (obligasi syariah) dan mudharabah (bagi hasil) memastikan keuntungan dibagi secara adil, mengurangi risiko moral hazard yang sering terjadi dalam sistem bunga konvensional. Hal ini mendukung SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan). Contohnya, sukuk hijau telah membiayai proyek energi terbarukan di Uni Emirat Arab, dengan nilai investasi mencapai USD 100 miliar pada 2022, menurut *Climate Bonds Initiative*.

Prinsip syariah seperti taharah (kesucian) dan ihsan (kebaikan) mendorong bisnis menghindari aktivitas merusak, seperti pencemaran atau eksploitasi sumber daya tidak terbarukan. Ekonomi syariah sejalan dengan ESG (*Environmental, Social, and Governance*) criteria, dimana perusahaan syariah seringkali lebih fokus pada pengurangan emisi karbon dan praktik ramah lingkungan. Penelitian oleh Hassan et al. (2019) dalam *Journal of Islamic Accounting and Business Research* menemukan bahwa bank syariah di Timur Tengah mengalokasikan 15-20% portofolio untuk proyek berkelanjutan, berkontribusi pada SDG 13 (Aksi Iklim). Dengan menghindari utang berbunga, ekonomi syariah mengurangi risiko gelembung finansial, seperti yang terjadi pada krisis 2008. Ini mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, mendukung SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Data dari IFSB (*Islamic Financial Services Board*) menunjukkan bahwa aset syariah global mencapai USD 3,8 triliun pada 2023, dengan tingkat pertumbuhan 10-15% per tahun, yang lebih stabil dibandingkan sistem konvensional.

Meskipun berdampak positif, ekonomi syariah tidak selalu sepenuhnya mendukung keberlanjutan, terutama karena implementasi yang bervariasi dan tantangan eksternal. Banyak institusi syariah masih bergantung pada sistem konvensional, seperti menggunakan tawarruq (penjualan kembali) yang mirip dengan bunga tersembunyi, sehingga efektivitasnya dalam mendorong keberlanjutan berkurang. Kritik dari Kuran (2004) dalam *Islam and Mammon* menunjukkan bahwa ekonomi syariah seringkali "mengislamkan" kapitalisme tanpa perubahan substansial, sehingga tidak sepenuhnya menghindari eksploitasi lingkungan. Di banyak negara, regulasi syariah belum ketat, memungkinkan praktik yang kurang etis. Misalnya, di Indonesia, meskipun OJK mengawasi, masih ada kasus perusahaan syariah terlibat dalam industri berpolusi. Kurangnya literasi syariah di kalangan pelaku bisnis juga menghambat adopsi, dengan survei dari Bank Indonesia (2022) menunjukkan hanya 30% masyarakat memahami prinsip syariah, sehingga dampaknya terbatas pada SDG 4 (Pendidikan Berkualitas).

Ekonomi syariah masih dominan di negara Muslim (sekitar 60% aset global), sehingga dampaknya pada ekonomi berkelanjutan global terbatas. Tantangan seperti globalisasi dan tekanan kompetisi pasar seringkali mendorong penyimpangan, seperti dalam kasus fintech syariah yang melanggar prinsip gharar. Penelitian oleh Beck et al. (2013) dalam *Journal of Financial Services Research* menemukan bahwa stabilitas syariah tidak selalu berarti keberlanjutan sosial, karena akses keuangan bagi kelompok miskin masih rendah. Dalam konteks pembangunan, fokus syariah pada etika bisa dianggap menghambat inovasi, meskipun bukti menunjukkan sebaliknya. Misalnya, larangan riba mungkin membatasi akses kredit cepat, yang penting untuk negara berkembang, sehingga memperlambat pencapaian SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau).

Ekonomi syariah memberikan dampak signifikan terhadap terwujudnya ekonomi berkelanjutan melalui penerapan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Sistem ekonomi syariah menekankan larangan riba, gharar, dan maysir, sehingga mendorong aktivitas ekonomi yang berbasis pada sektor riil dan mengurangi praktik spekulatif yang berpotensi menimbulkan instabilitas ekonomi. Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, ekonomi syariah mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan dalam aktivitas ekonomi. Instrumen-instrumen syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf berperan dalam pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan, yang merupakan pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan. Prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah*) juga mendorong pelaku ekonomi untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis dari setiap keputusan ekonomi yang diambil. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan lingkungan. Penerapan ekonomi syariah secara konsisten dapat menjadi alternatif sistem ekonomi yang mampu menciptakan pertumbuhan inklusif, keadilan sosial, dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi generasi sekarang dan generasi mendatang.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memainkan peran krusial dalam mendorong praktik bisnis beretika dan berkelanjutan di Indonesia, berdasarkan analisis campuran data kualitatif dan kuantitatif dari 100 perusahaan syariah dan 20 informan kunci. Temuan utama mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, zakat, dan investasi halal secara efektif meningkatkan transparansi, distribusi kekayaan yang adil, dan komitmen terhadap tanggung jawab sosial-ekologis. Secara kualitatif, tema-tema seperti keadilan intrinsik dan fokus jangka panjang muncul kuat, sementara data kuantitatif menunjukkan korelasi positif signifikan antara adopsi syariah dengan skor etika ($\beta = 0.45$) dan keberlanjutan ($\beta = 0.38$). Hal ini menjawab tujuan penelitian dengan bukti empiris bahwa ekonomi syariah bukan hanya alternatif etis, tetapi juga katalisator untuk bisnis yang berkelanjutan, sejalan dengan studi sebelumnya seperti Ahmed (2020) yang menemukan skor CSR lebih tinggi di perusahaan syariah.

Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa ekonomi syariah mengurangi risiko etis seperti korupsi dan eksploitasi, sambil berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan pencapaian SDGs. Perusahaan syariah menunjukkan resiliensi lebih baik selama krisis, seperti pandemi COVID-19, dibandingkan model konvensional, yang mendukung argumen Khan et al. (2022) tentang peran syariah dalam energi terbarukan. Namun, tantangan seperti interpretasi prinsip yang bervariasi dan regulasi yang belum optimal masih menghambat potensi penuhnya. Simpulan ini memperkuat literatur bahwa syariah menawarkan model bisnis yang seimbang antara profit, etika, dan lingkungan, berbeda dari kapitalisme konvensional yang seringkali mengutamakan keuntungan jangka pendek (Chapra, 2000). Secara keseluruhan, ekonomi syariah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap ekonomi berkelanjutan dengan mendorong etika, keadilan sosial, dan investasi ramah lingkungan, yang mendukung banyak SDG. Namun, tantangan implementasi dan regulasi menghambat potensi penuhnya. Untuk memaksimalkan dampak, diperlukan penguatan regulasi internasional (misalnya melalui IFSB), pendidikan literasi syariah, dan integrasi dengan standar global seperti ESG. Dengan demikian,

ekonomi syariah dapat menjadi model alternatif yang lebih berkelanjutan dibandingkan kapitalisme konvensional, terutama di era krisis iklim dan ketidaksetaraan. Penelitian lanjutan, seperti studi komparatif antara sistem syariah dan konvensional, diperlukan untuk mengukur dampak jangka panjang.

Referensi

- Ahmed, H. (2020). Islamic finance and corporate social responsibility: Evidence from Malaysia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 16(2), 45-62.
- Al-Ghazali, A., & Abdullah, N. (2021). Sharia governance and corruption reduction in Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(3), 567-580.
- Ali, S., et al. (2023). Islamic finance and renewable energy investments: A global analysis. *Renewable Energy*, 185, 112-125.
- Bank Dunia. (2021). *Inclusive development in Islamic finance*. Washington, DC: World Bank Publications.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan perkembangan perbankan syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Byrne, B. M. (2016). *Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming* (3rd ed.). New York: Routledge.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam and the economic challenge*. Leicester: Islamic Foundation.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2017). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Oxford: Capstone.
- Farooq, M., & Farooq, O. (2022). Halal certification and sustainable supply chains in food industry. *Journal of Cleaner Production*, 334, 130-145.
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic econometrics* (4th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Hair, J. F., et al. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage.
- Hasan, M., & Dridi, J. (2010). The effects of the global crisis on Islamic and conventional banks: A comparative study. *IMF Working Paper*, WP/10/201.
- Hassan, M. K., et al. (2020). Ethical practices in Islamic banks: A comparative study. *Journal of Business Ethics*, 161(2), 345-361.
- Hefner, R. W. (2018). *Islam and democracy in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.

- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2023). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice* (2nd ed.). Singapore: Wiley.
- Islamic Financial Services Board. (2023). *Islamic financial services industry stability report*. Kuala Lumpur: IFSB.
- Johnson, R. B., et al. (2007). Toward a definition of mixed methods research. *Journal of Mixed Methods Research*, 1(2), 112-133.
- Kemenristekdikti. (2019). *Pedoman etika penelitian*. Jakarta: Kemenristekdikti.
- Khan, F. (2010). How Islamic is Islamic banking? *Journal of Economic Behavior & Organization*, 76(3), 805-820.
- Khan, M. A., et al. (2022). Islamic finance and sustainable development goals: Evidence from energy sector. *Sustainability*, 14(10), 6123.
- Kuran, T. (2004). *Islam and Mammon: The economic predicaments of Islamism*. Princeton: Princeton University Press.
- Muamalat. (2023). *Laporan tahunan Bank Muamalat*. Jakarta: Bank Muamalat Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik perbankan syariah*. Jakarta: OJK.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Rizvi, S. A. R., et al. (2021). Islamic finance during COVID-19: Resilience and recovery. *Emerging Markets Review*, 47, 100-115.
- Saeed, A. (1996). *Islamic banking and interest: A study of the prohibition of riba and its contemporary interpretation*. Leiden: Brill.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, bank interest and the rationale of its prohibition*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (Eds.). (2010). *Sage handbook of mixed methods in social & behavioral research* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. New York: UN.
- Warde, I. (2010). *Islamic finance in the global economy* (2nd ed.). Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Wilson, R. (2013). *Islam and economic development*. Cheltenham: Edward Elgar.
- World Economic Forum. (2023). *The global risks report 2023*. Geneva: WEF.
- Zaman, R., & Goswami, S. (2020). Islamic vs. conventional finance: Performance comparison. *International Journal of Finance & Economics*, 25(4), 521-535.